



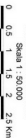
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2011
TANGGAL 2 DESEMBER 2011

PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
KETERANGAN GAMBAR



IBUKOTA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota lainnya

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Batas Kecamatan
- Batas Landa Kontinen kesepakatan, telah diratifikasi
- Batas ZEE kesepakatan, belum diratifikasi

- Batas ZEE Indonesia (Unilateral)

- Batas Laut Teritorial

- Batas Laut Teritorial kesepakatan, telah diratifikasi

- Batas Laut Teritorial, perlu kesepakatan
- Batas Zona Tambahan

- Garis Pangkal

- Titik Dasar

- Batas Laut Teritorial Indonesia - Singapura

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai
- Waduk

- Wilayah KTRPB

KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawasanya (L1)

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Perlindungan Sempit (L2)

- Sempadan Sungai
- Kawasan Sekitar Waduk
- KTH Kota

- Kawasan Suka Alam, Pektarian Alam dan Cagar Budaya (L3)

- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
- Kawasan Kawasan Berencana Alam (L4)

- Kawasan Kawasan Tanah Lempur

- Kawasan Kawasan Celompong, Pisang

- Kawasan Lindung Geologi (L5)
- Kawasan Kawasan Gerakan Tanah dan Kawasan Kawasan Abrasi

- Sempadan Mula Air

- Kawasan Taman Berti (L6)

KAWASAN BUDIDAYA

- Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Tinggi (B1)

- Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Sedang (B2)

- Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Rendah (B3)

- Kawasan Peruntukan Industri (B4)

- Kawasan Peruntukan Pariwisata (B5)

- Kawasan Budidaya Lain (B6)

- Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)

- Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)

- Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan, Sosial-budaya, Bioteknologi (B6.3)

- Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)

- Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa (B6.5)

7/7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARINJAN
KETTERANGAN GAMBAR
Skala 1 : 50.000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

USULAN PERUBAHAN FUNGSI

	Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	HL.B1.5	Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	TL.B6.5	Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B6.3
HL.B2	Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	HL.B2	Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	HL.B1.5	Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B6.5
HL.B4	Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	HL.B2	Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan buru	TL.B1	Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B1
HL.B5	Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	HL.B3	Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B2	Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B2
HL.B6	Zona B6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung		Waduk/Danau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	TL.B3	Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B3
HL.B1.5	Zona B6.2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	TL.B6.2	Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B6	Zona L6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B6
HL.B6.3	Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	TL.B6.4	Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	TL.B6.4	Waduk/Danau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru	
HL.B6.4	Zona B6.4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung	TL.B6.5	Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman buru			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
FITA RENCANA POLA RIANG
KAWASAN BATIM, BINTAN, DAN KARIMUN
KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 50.000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

TYA-B1	Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	KSA-B4	Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan suaka alam	HTB-B1	Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
TYA-B4	Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	CSA-L1	Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan suaka alam	HTB-B2	Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
TYA-B5	Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	KPA-B4	Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam	HTB-B3	Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
TYA-B3	Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	KPA-L1	Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam	HTB-B4	Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
TYA-B5	Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi	HP-B5	Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi	HTB-B5	Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
TYA-L1	Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	HPB-B6	Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi	HTB-B6	Zona B6.2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
TYA-L3	Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	HP-L1	Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi	HTB-B3	Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas
	Wabuk/Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman wisata alam	HP-L2	Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi	HTB-B5	Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PETA RENCANA POLA RIANG
KAWASAN BATATA, BINTAN, DAN KARIMUN
KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 50.000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

HP7/L1

Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas

HP7/L2

Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas

HP7/L3

Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas

HPK/B1

Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B2

Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B3

Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B4

Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B5

Zona B5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B6

Zona B6 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B6.2

Zona B6.2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B6.3

Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/B6.5

Zona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/L1

Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/L2

Zona L2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

HPK/L3

Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi

147



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SUMBER PETA

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelandaran, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Stak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791)

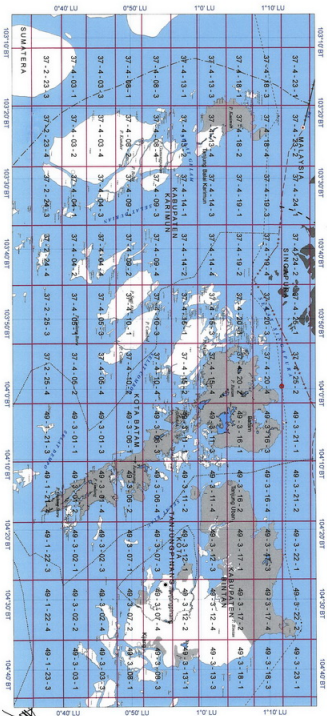


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SUMBER PETA

9. Peta Dasar Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Edisi Tahun 1984 dan 2009, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
10. Peta KTRWN Skala 1 : 2.500.000 Tahun 2008, Kementerian Pekerjaan Umum
11. Peta TCHK Provinsi Riau Skala 1 : 500.000 Tahun 1986 (SK Menhut No : 173/Kpts-II/1986), Kementerian Kehutanan
12. Peta Kawasan Hutan Wilayah Pulau Batam, Kementerian Kehutanan
13. Peta Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Muka Kuning Skala 1 : 25.000 Tahun 1990, Kementerian Kehutanan
14. Peta Taman Buari Pulau Rempang Skala 1 : 250.000 Tahun 1986 (SK Menhut No : 307/Kpts-II/1986, Tanggal 29 September 1986), Kementerian Kehutanan
15. Peta Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan S, Jago, S, Encalai, S, Bintan, S, Kangbei dan S, Kawal Skala 1 : 100.000 Tahun 1992 (SK Menhut No : 955/Kpts-II/1992, Tanggal 3 Oktober 1992), Kementerian Kehutanan
16. Peta Penetapan Tata Batas Hutan Lindung Pulau Karimun Kecil Skala 1 : 20.000 Tahun 1999 (Lampiran SK Menhut No : 523/Kpts-II/1999, Tanggal 6 Juli 1999), Kementerian Kehutanan
17. Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Jantan - Ketina Skala 1 : 20.000 Tahun 2004 (Lampiran SK Menhut No : 80/Kpts-II/2004, Tanggal 10 Maret 2004), Kementerian Kehutanan
18. Peta Pungsi Tatu Culu Laut Kabupaten Karimun Skala 1 : 350.000 Tahun 2006, BAFTTA Kabupaten Karimun
19. Peta Hidrogeologi Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Skala 1 : 250.000, Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



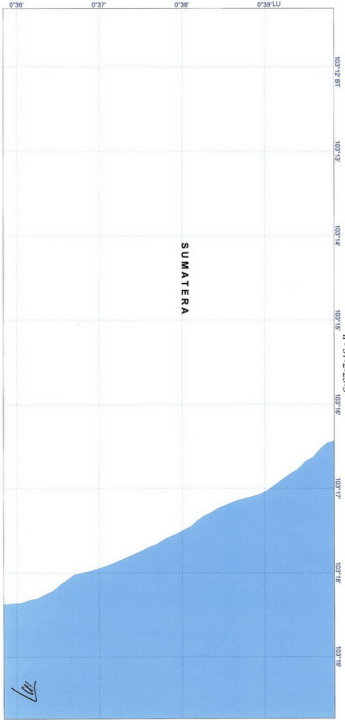
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INDEKS FETA





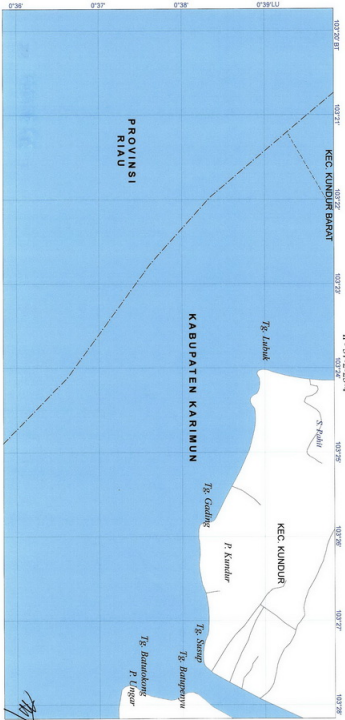
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 57 - 2 - 23 - 3

SUMATERA





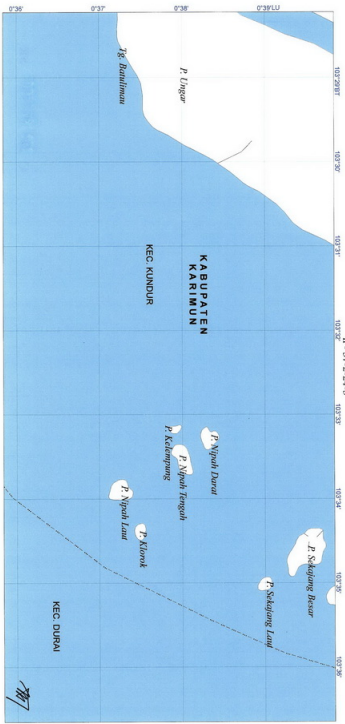
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 51 - 2 - 23 - 4



707



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-2-24-3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-2-24-4

103°37' BT

103°38'

103°39'

103°40'

103°41'

103°42'

103°43'

103°44'

103°45'

KEC. MORO

KABUPATEN KARIMUN

KEC. DURAI

P. Berne

P. Mempoa

P. Labu

P. Kas

P. Kajoh

P. Nipis

P. Sanglar

P. Ulat

P. Kajoh

P. Sanglar Kecil

P. Monierus

747



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-2-25-3

103°46'BT
KEC. MORO

103°47'

103°48'

103°49'

103°50'

103°51'

103°52'

103°53'

0°39'LU

0°38'

0°37'

0°36'

KABUPATEN
KARIMUN

KEC. DURA

P. Pulau Ulu

12/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-2-25-4

103°54'BT

103°56'

103°58'

103°57'

103°58'

103°59'

104°0'

104°1'

0°38'LU

0°38'

0°37'

0°36'

KABUPATEN KARIMUN
KEC. DURAI

KEC. GALANG
KOTA BATAM

57



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-03-1

103°12' BT

103°13'

103°14'

103°15'

103°16'

103°17'

103°18'

103°19'

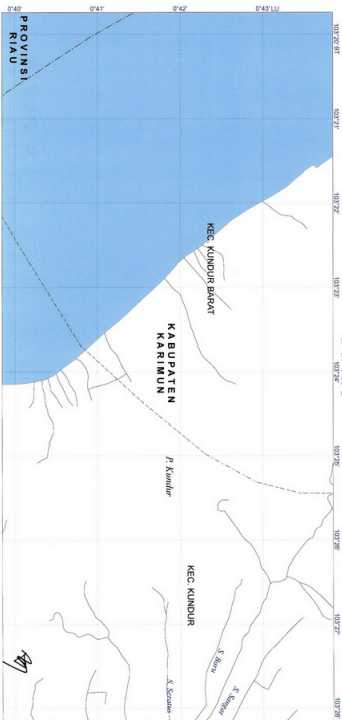
PROVINSI
RIAU

KABUPATEN
KARIMUN
KEC. KUNDUR BARAT

147



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-03-2



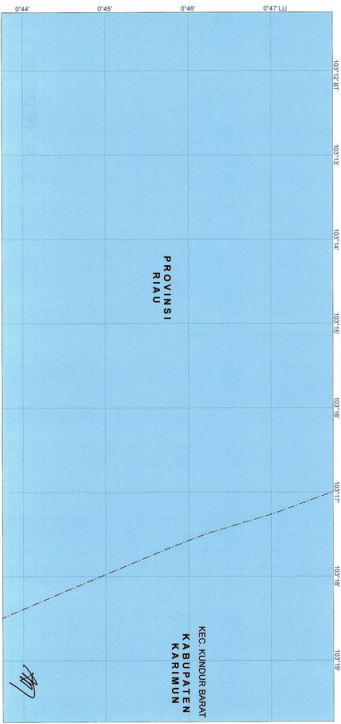


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-03-3

PROVINSI
RIAU

KEC. KUNDUR BARAT
KABUPATEN
KARIMUN

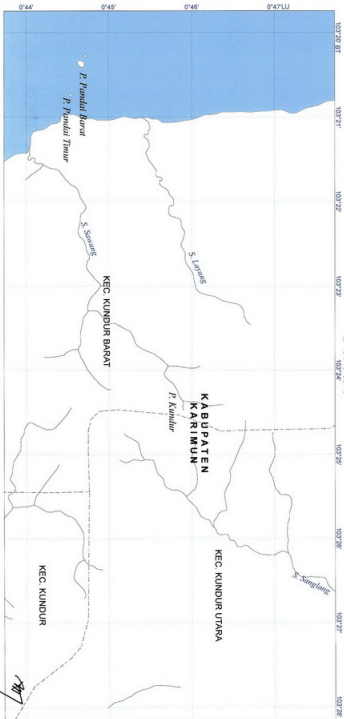
147





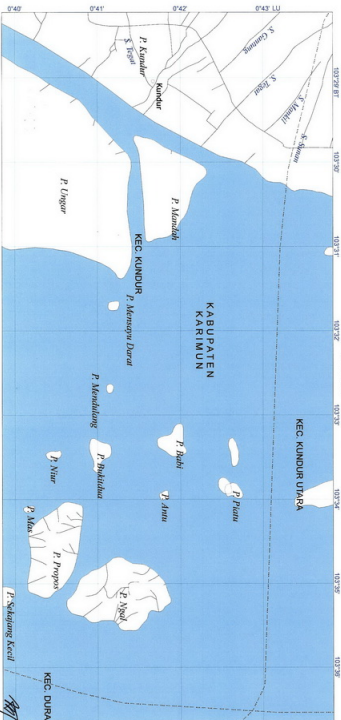
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-03-4



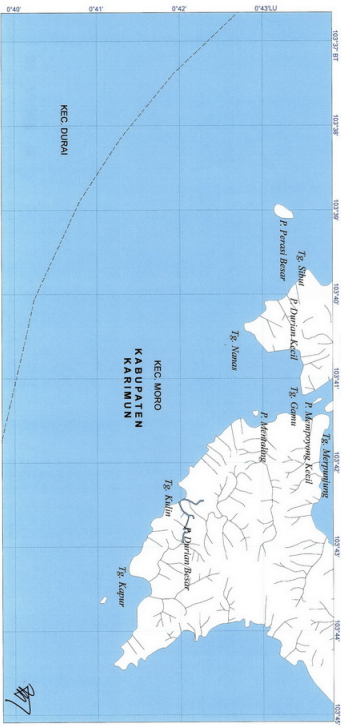


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-04-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-04-2



147

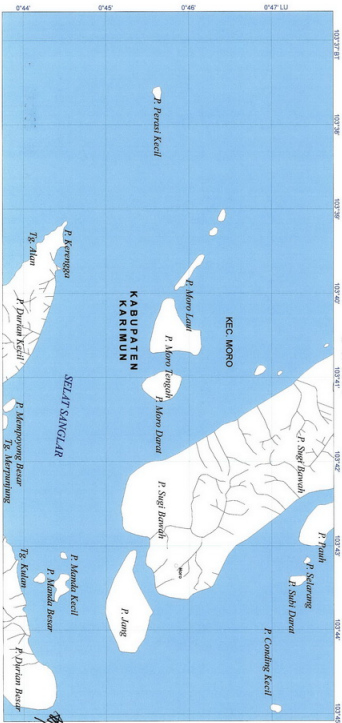


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-04-3





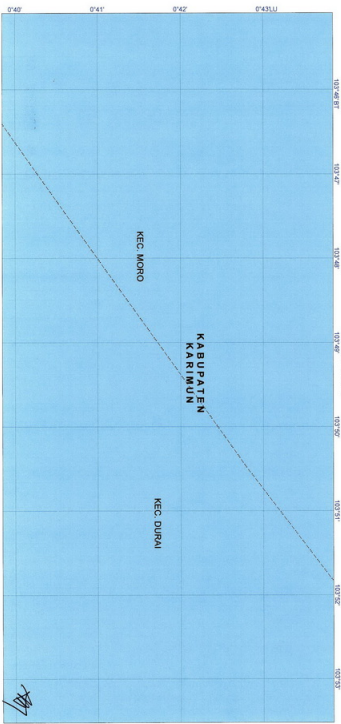
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-04-4



17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-05-1



147



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-05-2

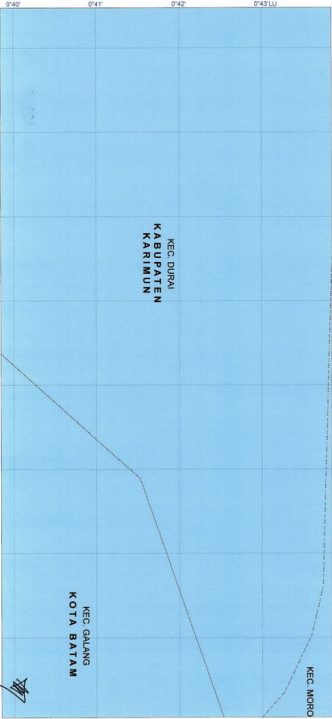


103°44' 103°45' 103°46' 103°47' 103°48' 103°49' 103°50' 103°51' 103°52' 103°53' 103°54' 103°55' 103°56' 103°57' 103°58' 103°59' 104°0' 104°1'

KEC. DURAL
KABUPATEN
KARIMUN

KEC. GALANG
KOTA BATAM

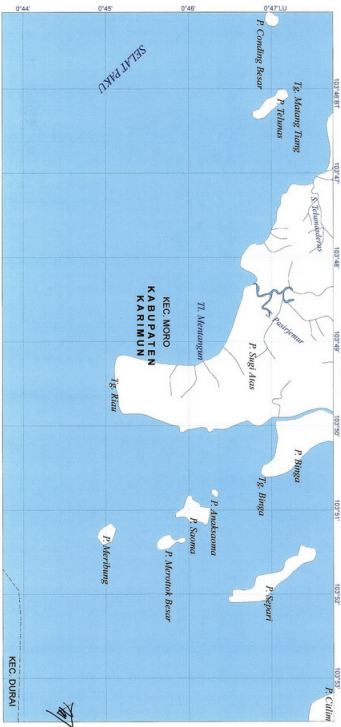
KEC. MORO



[Handwritten signature]



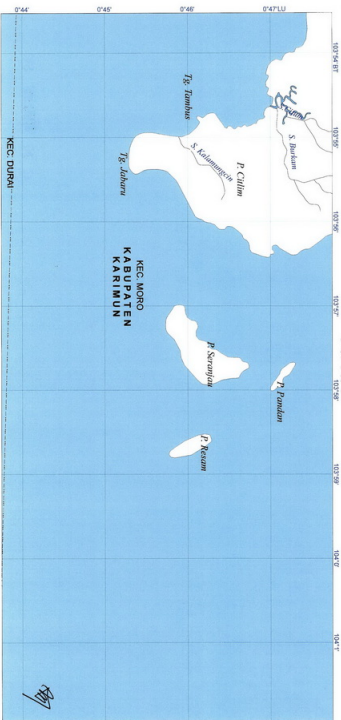
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-05-3



147



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1 - 37-4-05-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-08-1

103°12'BT

103°13'

103°14'

103°15'

103°16'

103°17'

103°18'

103°19'

PROVINSI
RIAU

P. Lalang

KEC. KUNDUR BARAT
KABUPATEN
KARIMUN

0°48'

0°49'

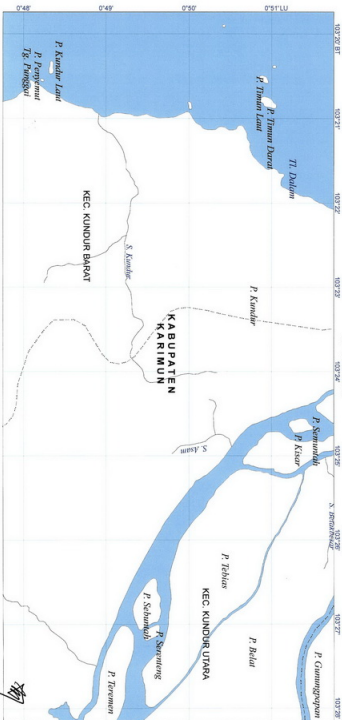
0°50'

0°51'LU

14/7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37.4-08-2



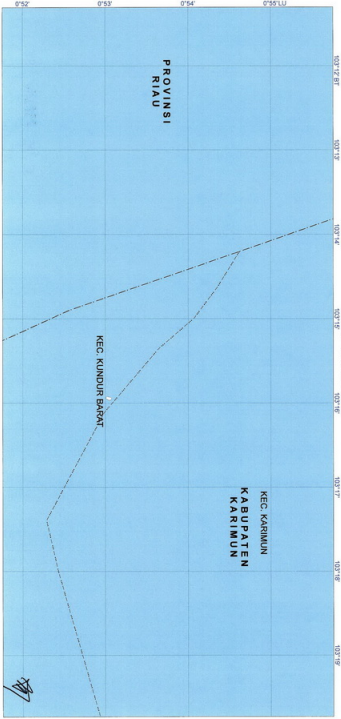


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-08-3

PROVINSI
RIAU

KEC. KARIMUN
KABUPATEN
KARIMUN

KEC. KUNDUR BARAT



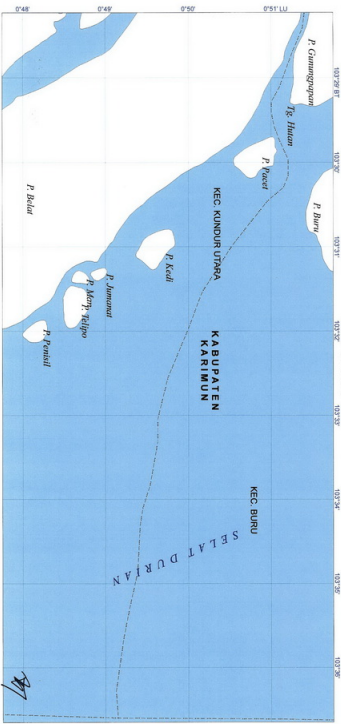


II - 37-4-08-4





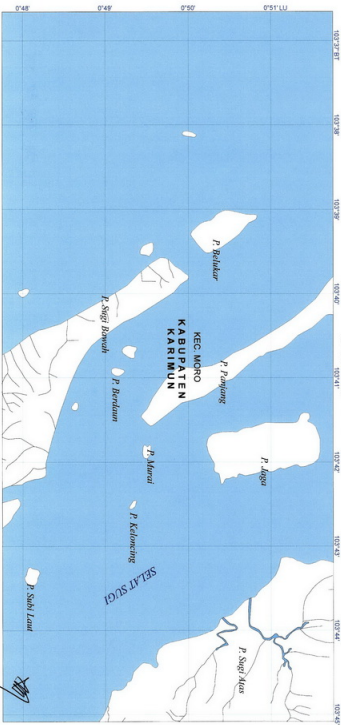
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-09-1



47

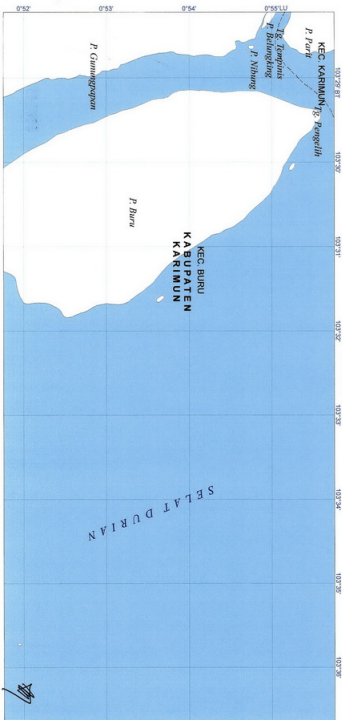


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-09-2



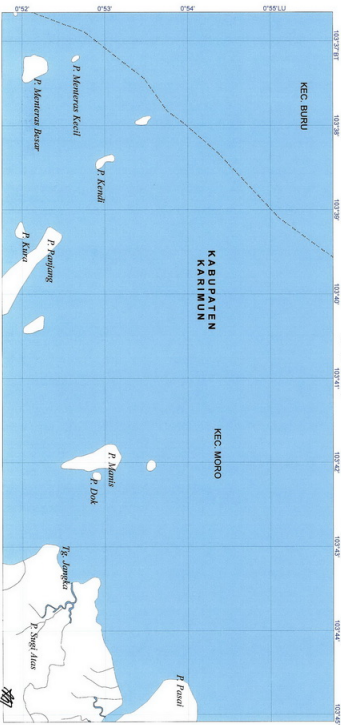


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-09-3



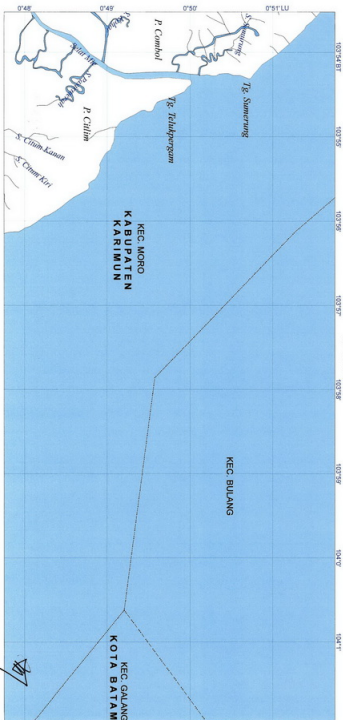


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-09-4





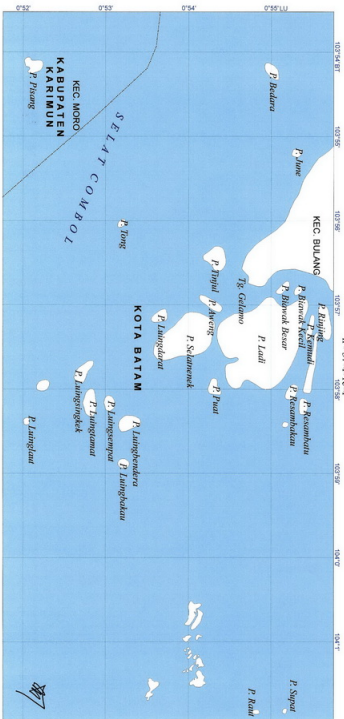
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-10-2



147

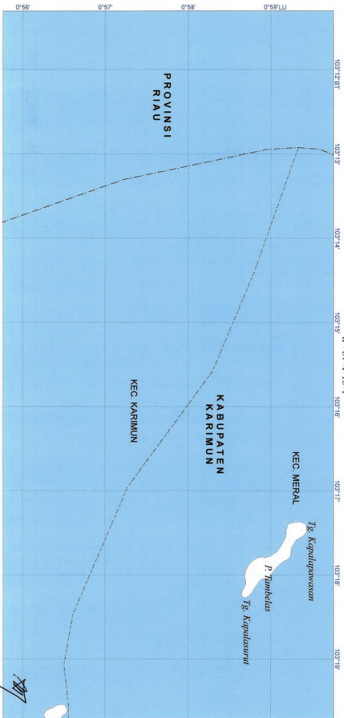


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-10-4



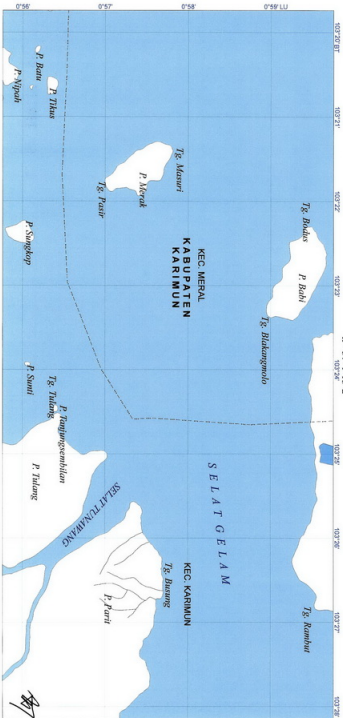


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-13-1





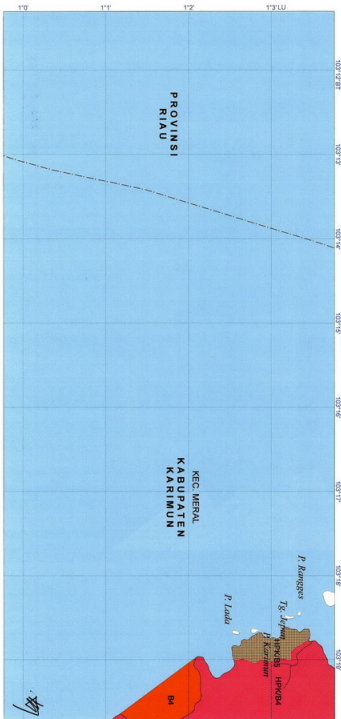
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-13-2



107

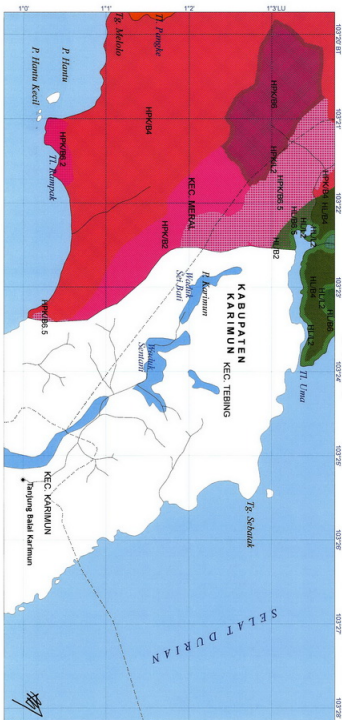


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-13-3



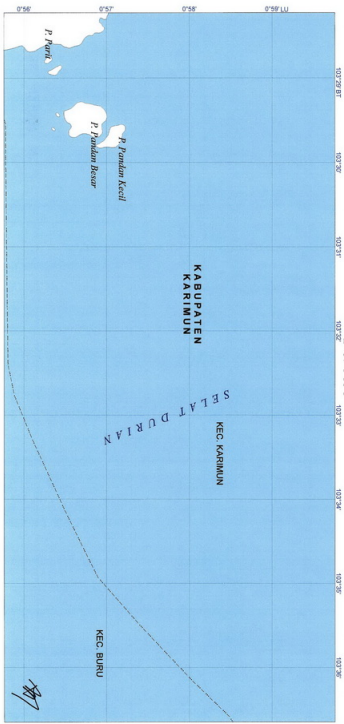


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37.4-13-4



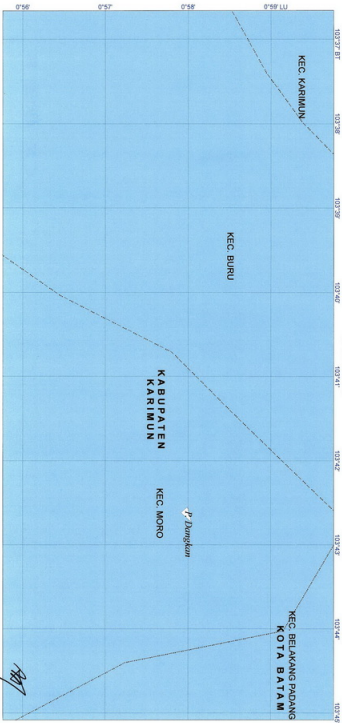


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-14-1



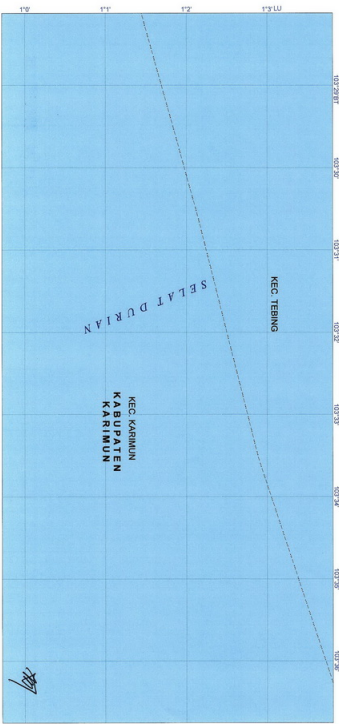


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-14-2





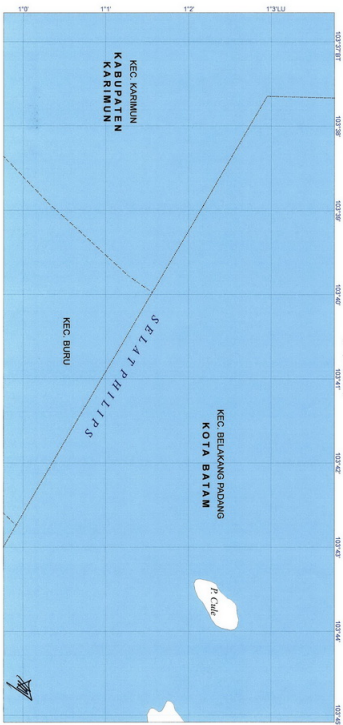
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-14-3





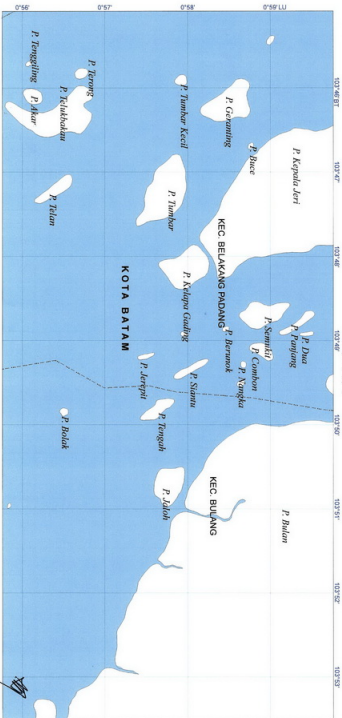
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-14-4



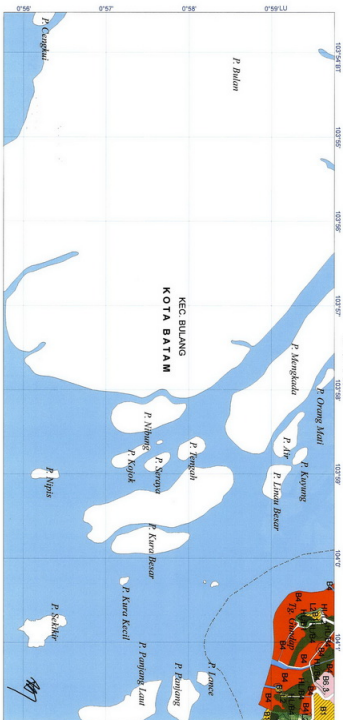


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-15-1



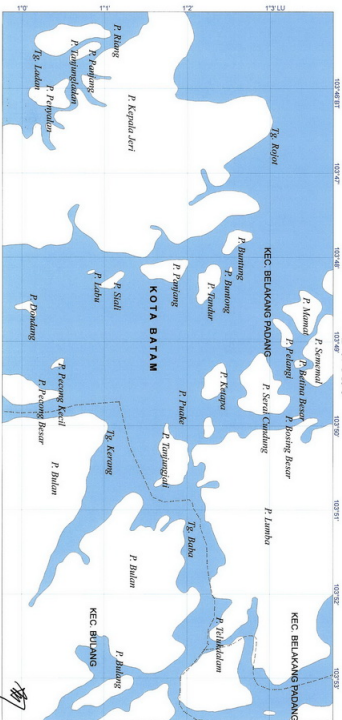


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-15-2





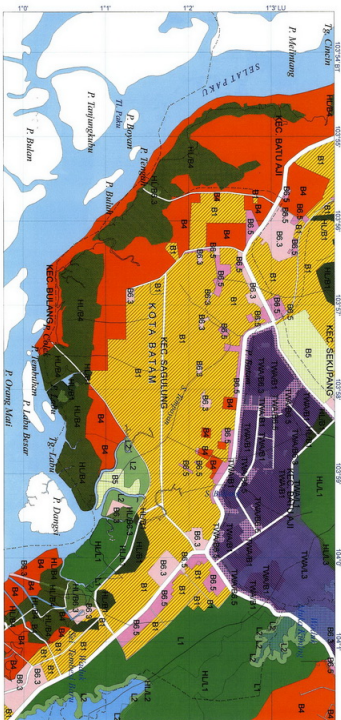
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-15-3



147

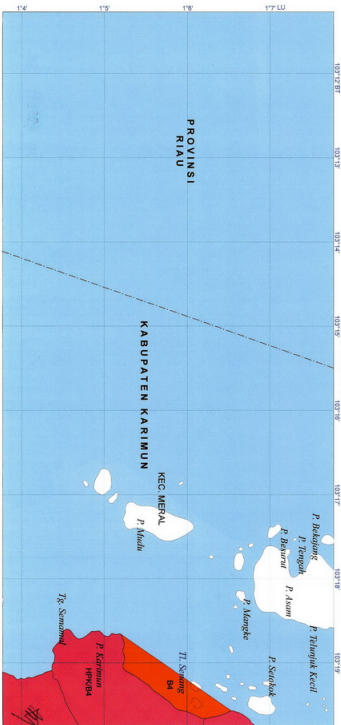


II - 37-4-15-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-18-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37.4-18.2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-18-3

103°12' BT

103°13'

103°14'

103°15'

103°16'

103°17'

103°18'

103°19'

1°11' LU

1°10'

1°9'

1°8'

PROVINSI
RIAU

KABUPATEN
KARIMUN

P. Tokongkelantar

P. Tokongbelanda Besar

P. Tokongbelanda Kecil

KEC. MERAL

P. Asam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-19-1

103°28' BT 103°30' 103°31' 103°32' 103°33' 103°34' 103°35' 103°36'

SELAT DURIAN

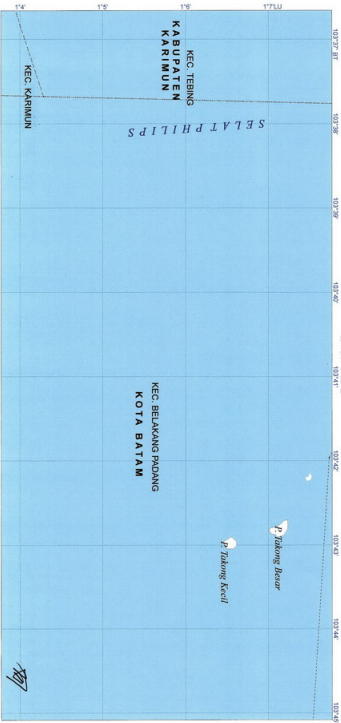
KEC. TEBING
KABUPATEN
KARIMUN

Handwritten signature or initials.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-19-2

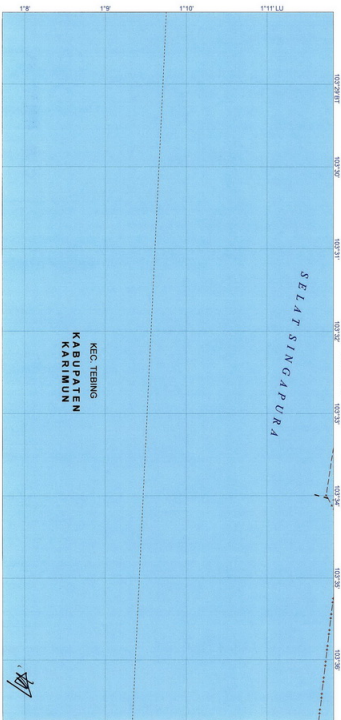




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-19-3

SELAT SINGAPURA

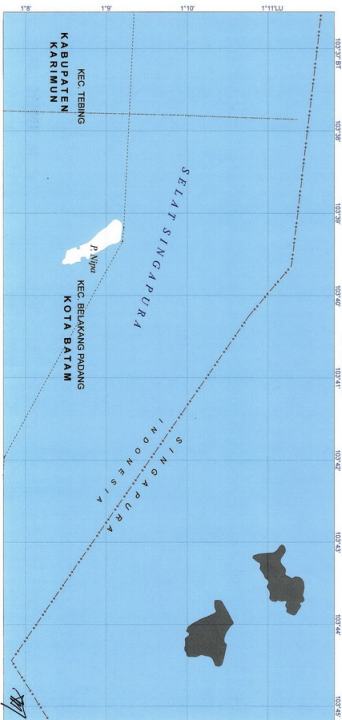
KEC. TEBING
KABUPATEN
KARIMUN





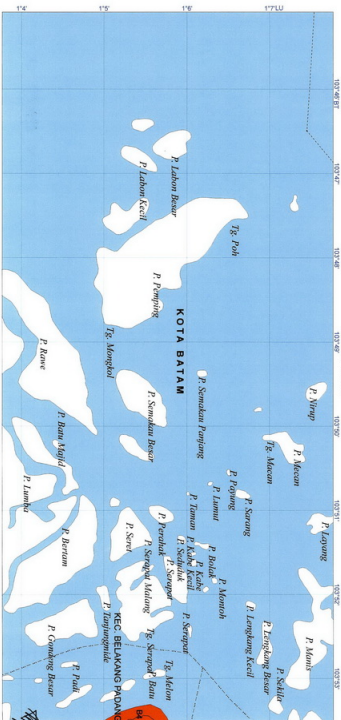
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-19-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-20-1

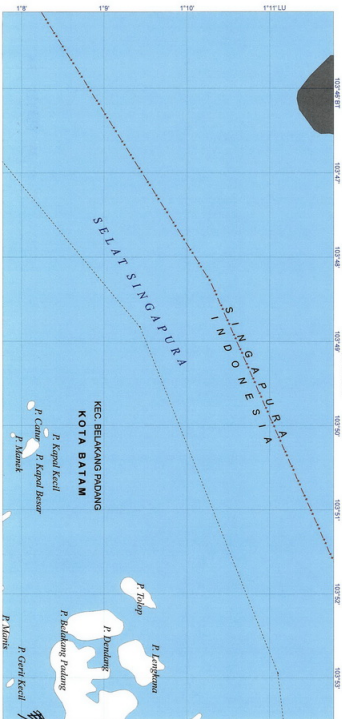


17/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

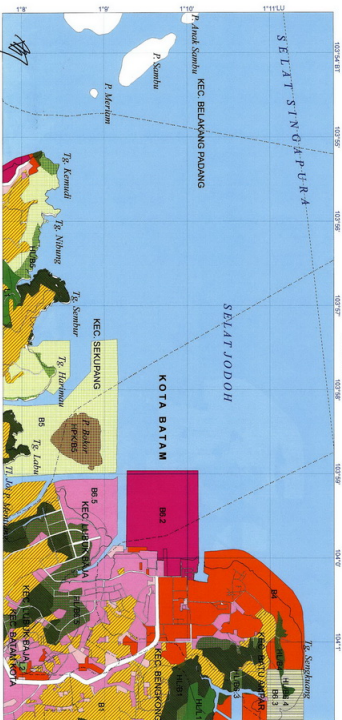
II - 37-4-20-3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-20-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-23-1

S E L A T M A L A K A

103°12'BT

103°13'

103°14'

103°15'

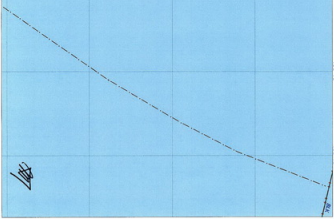
103°16'

103°17'

103°18'

103°19'

1°12' 1°13' 1°14' 1°15'LU

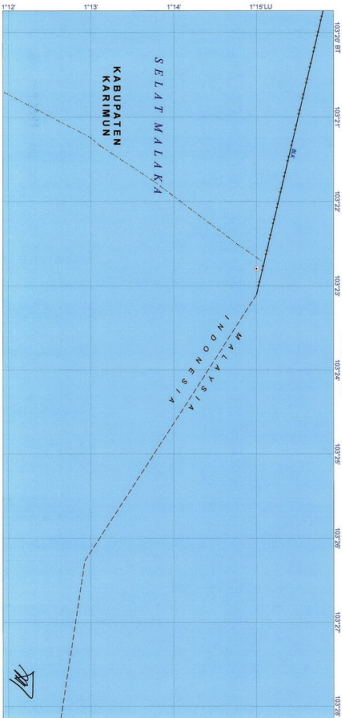


1037



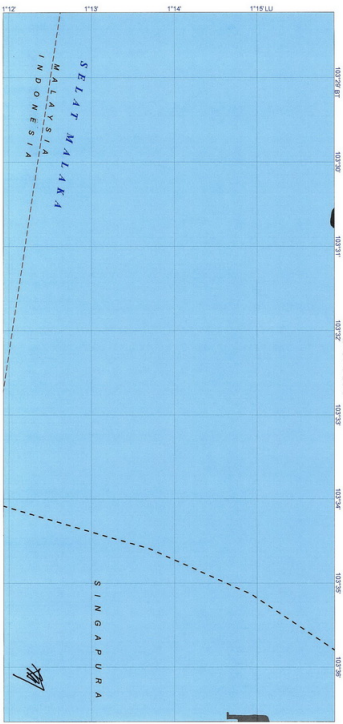
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37.4-23.2





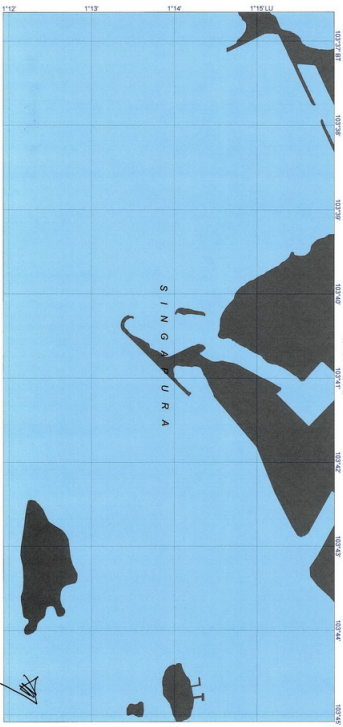
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 37-4-24-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-24-2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

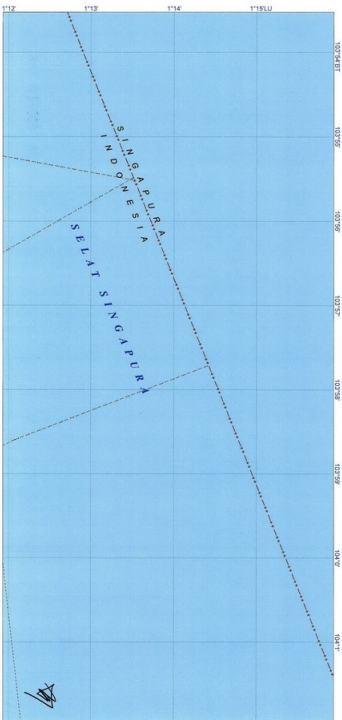
II - 37-4-25-1





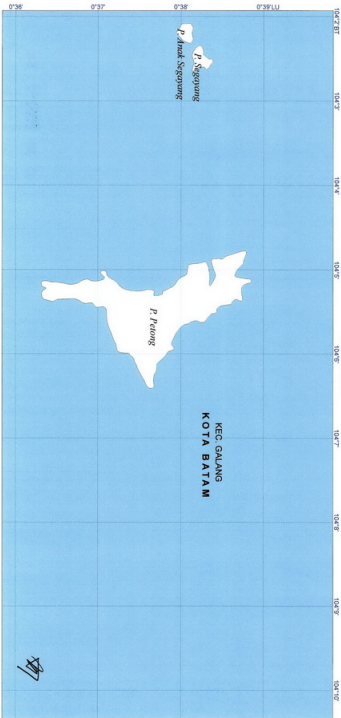
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 37-4-25-2



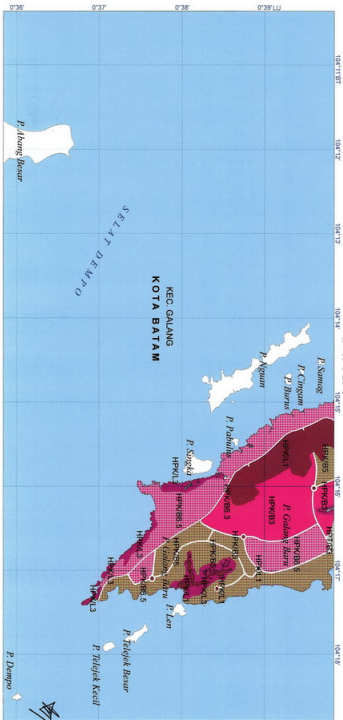


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49 - 1 - 21 - 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-1-21-4



P. Demjano



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-1-22-3

104°19' 00"

104°20'

104°21'

104°22'

104°23'

104°24'

104°25'

104°26'

104°27'

KEC. GALANG
KOTA BATAM

KABUPATEN
BINTAN

[Handwritten signature]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-1-22-4

L A U T N A T U N A

104°28'00"

104°29'

104°30'

104°31'

104°32'

104°33'

104°34'

104°35'

0°39'LU

0°38'

0°37'

0°36'

[Handwritten signature]



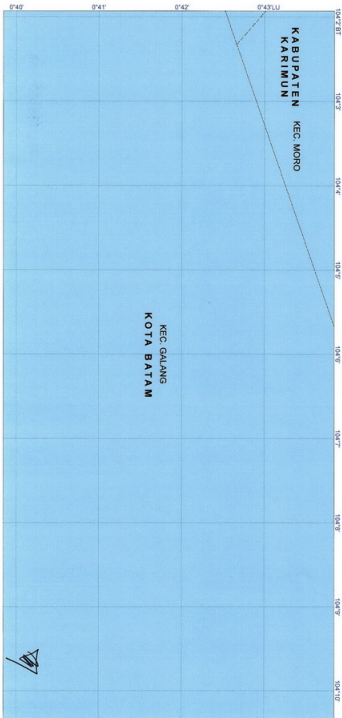
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-1-23-3

L A U T N A T U N A

107

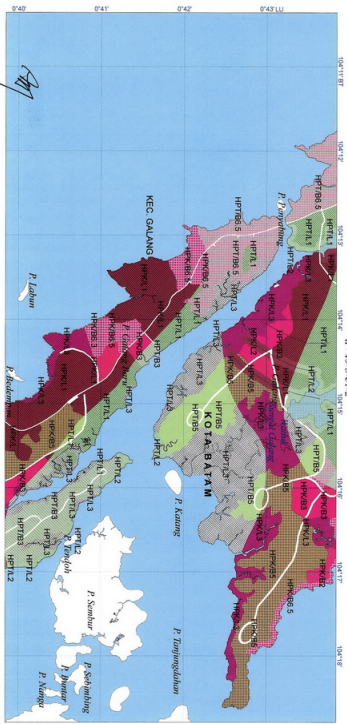


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-01-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-01-2





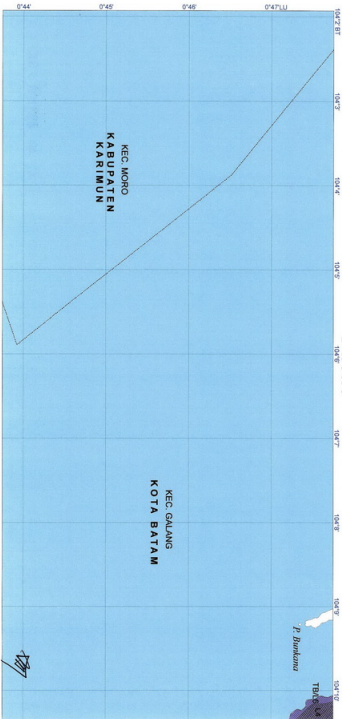
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-01-3

KEC. MORO
KABUPATEN
KARIMUN

KEC. GALANG
KOTA BATAM

P. Burukana

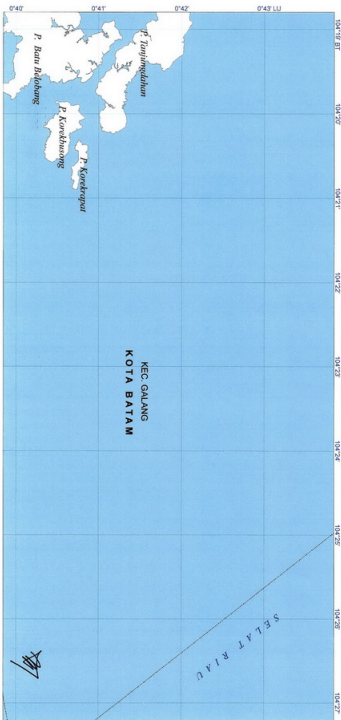
TBAG. L6





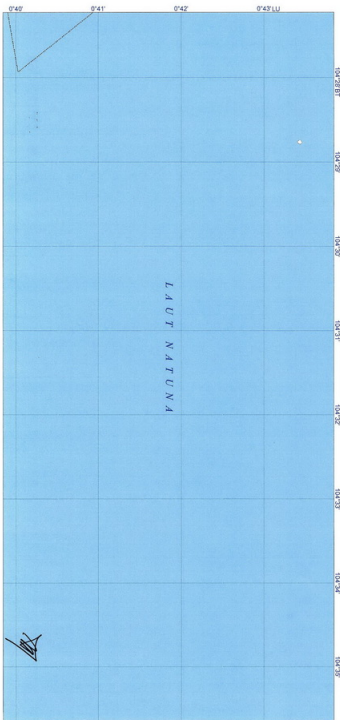
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49.3-02-1



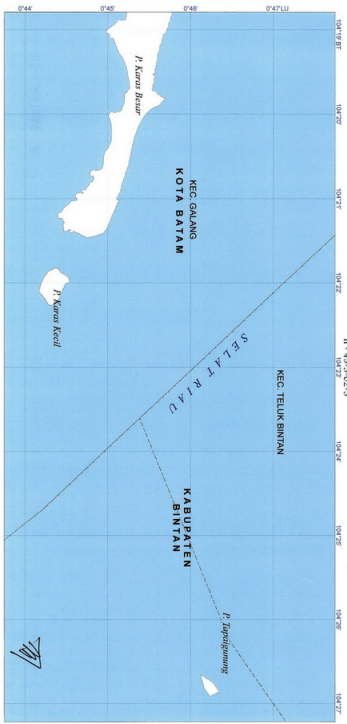


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49.3-02.2





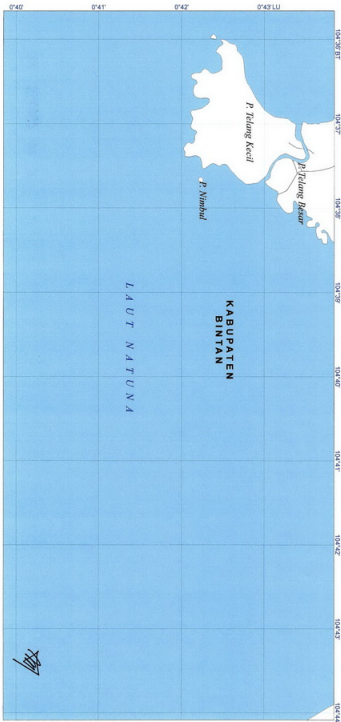
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-02-3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-3-03-1



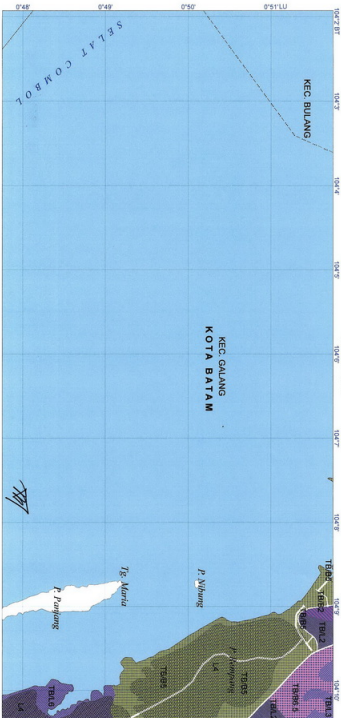


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-03-3



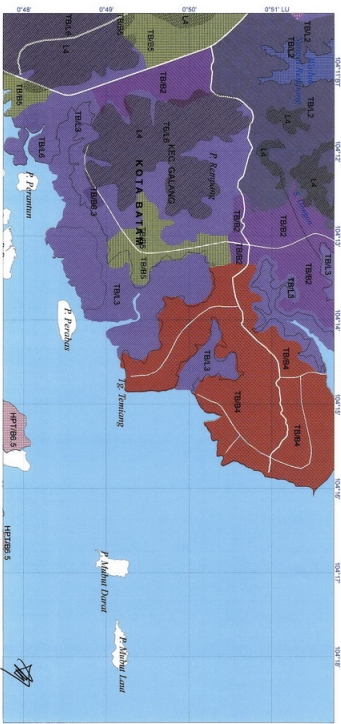


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-06-1



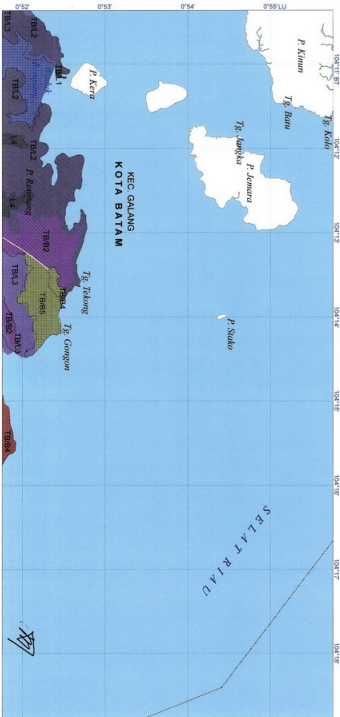


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-06-2



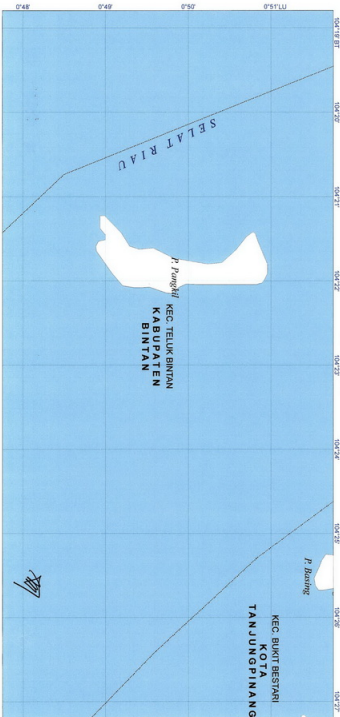


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-06-4



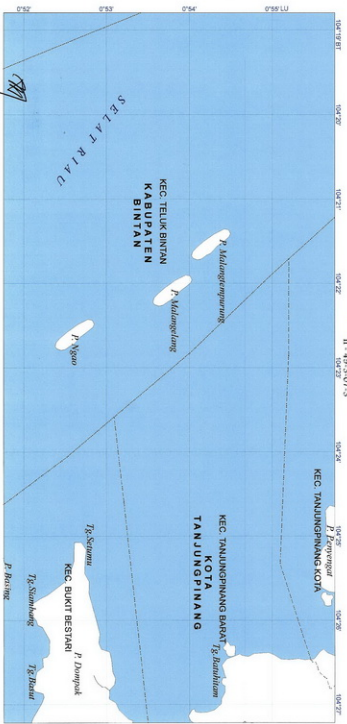


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-S-07-1





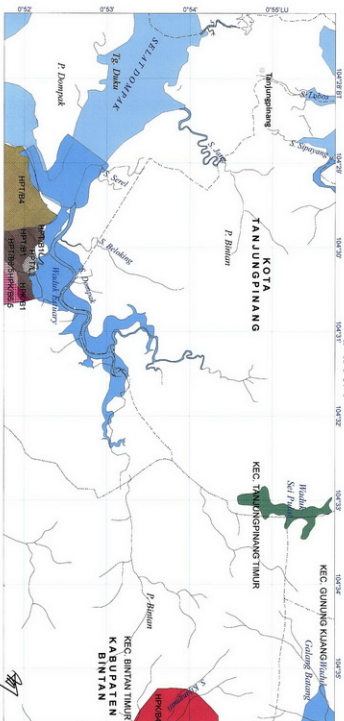
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49 - 3 - 07 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-3-07-4





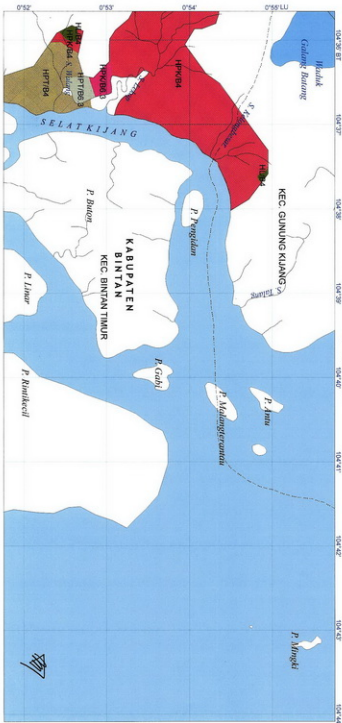
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

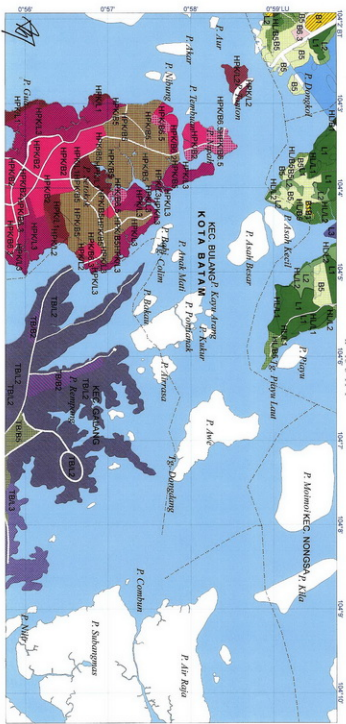
II - 49 - 3 - 08 - 1





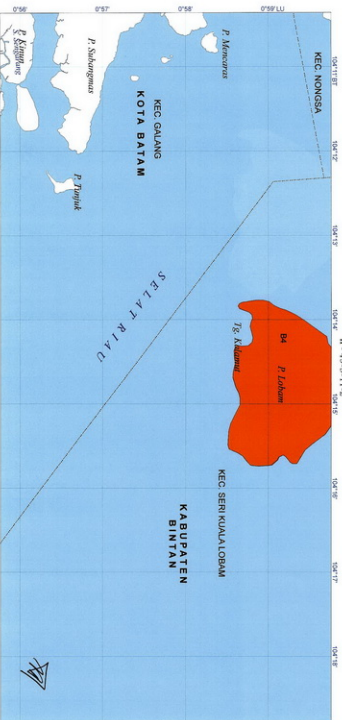
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49 - 3 - 08 - 3




$$= 49.3 \pm 1.1$$




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-S-11-2



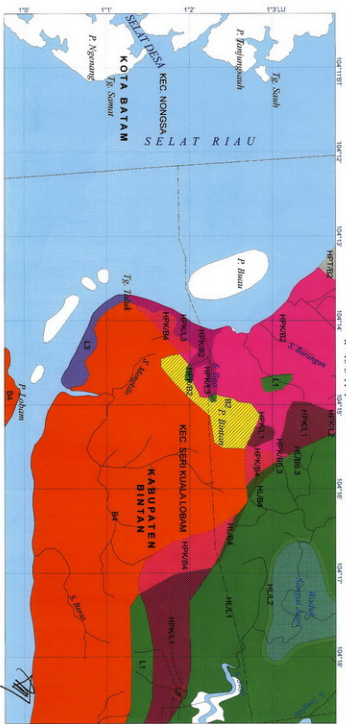


11-49-3-11-3



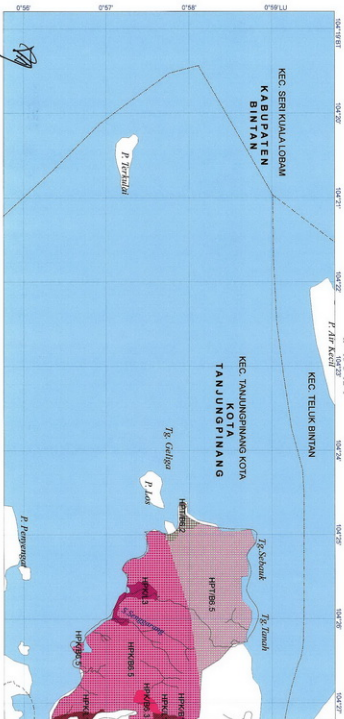


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-11-4





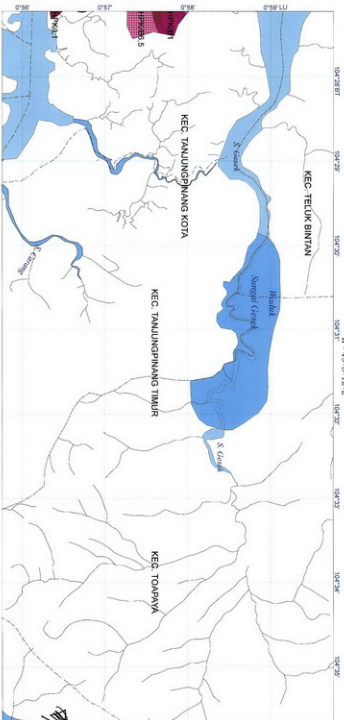
PRAESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49 - 3 - 12 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

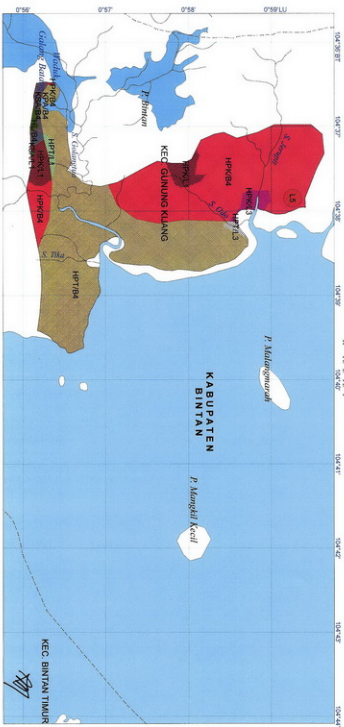
II - 49 - S - 12 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49 - S - 13 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

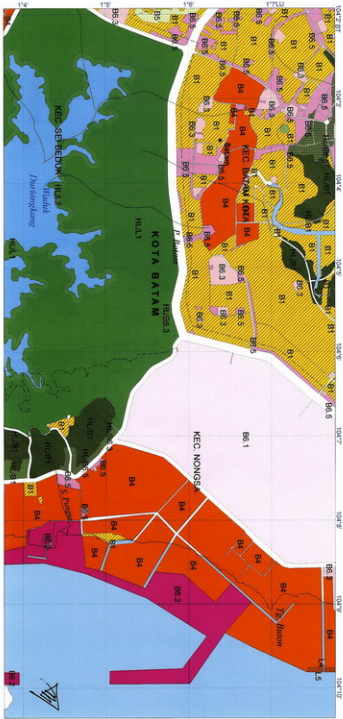
II - 49 - 5 - 13 - 3





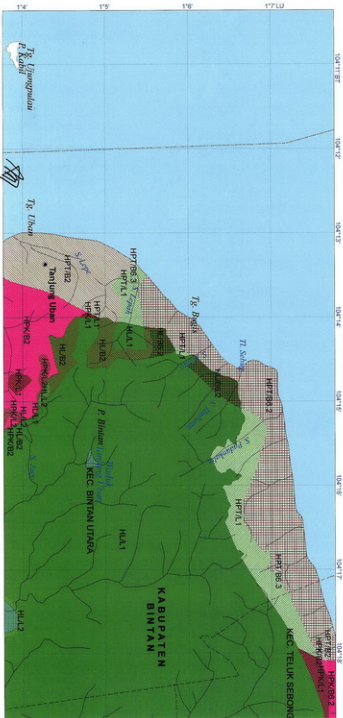
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49.3-16-1



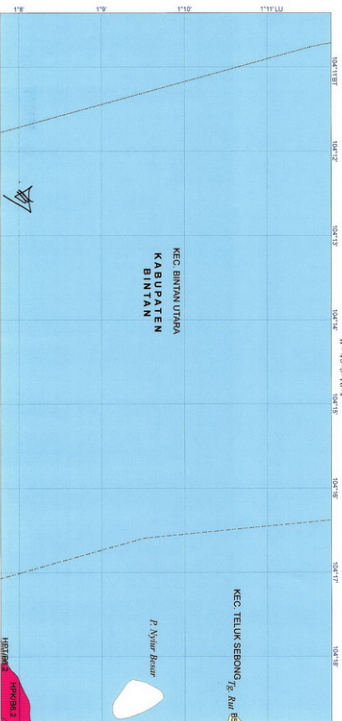


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-16-2





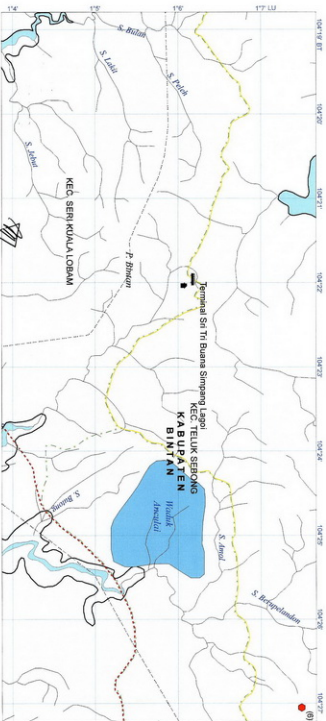
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-S-16-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

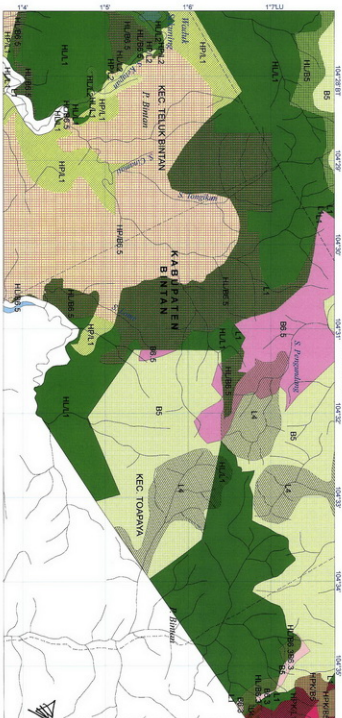
1 - 49 - 3 - 17 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-S-17-2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49.3-17-3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49.3-17-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49 - 3 - 18 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49 - 3 - 18 - 3

KEC. TELUK SEBONG

L A U T N A T U N A

KEC. GUNUNG KUANG
KABUPATEN
BINTAN

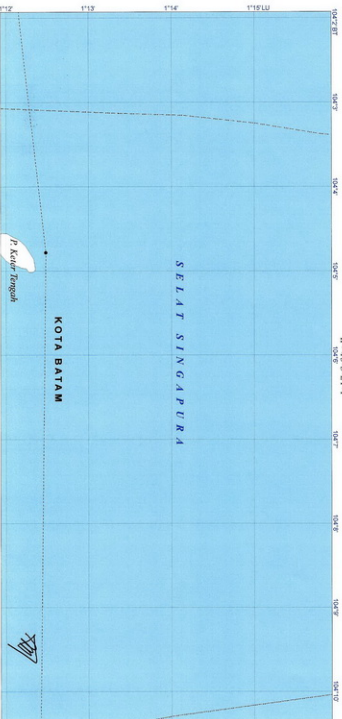
TL Lingkar
LA
KOL
5

177



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49.3-21-1

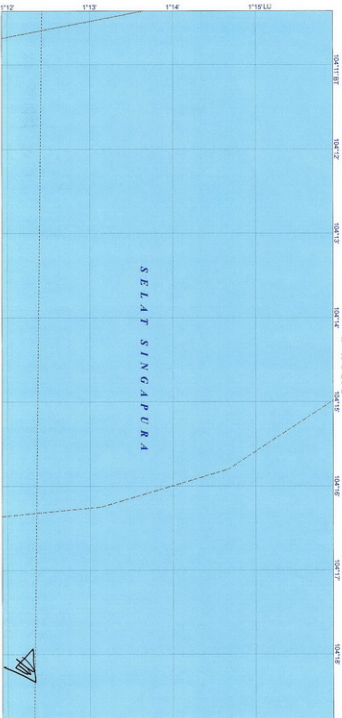




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 49-3-21-2



SELAT SINGAPURA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49.3.22-1

104°19'BT

104°20'

104°21'

104°22'

104°23'

104°24'

104°25'

104°26'

104°27'

1°15'LU

1°14'

1°13'

1°12'

S E L A T S I N G A P U R A

**KABUPATEN
BINTAN**

Tg. Sealing

BS

Tg. Deckp





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-S-22-Z

104°28' BT

104°29'

104°30'

104°31'

104°32'

104°33'

104°34'

104°35'

SELAT SINGAPURA

KABUPATEN
BINTAN

Tg. Beretir

B5

KEC. TELUK SEBONG
P. Bintan

Tl. Asuh

Tl. Marbau

L4

L4
B518

P. Koko

Tg. Lokan

L5

L4

L5

L4

L5

L4

L5

L4

L5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 49-S-28-1

104°40'

104°41'

104°42'

104°43'

104°44'

104°36'BT

104°37'

104°38'

104°39'

S E L A T S I N G A P U R A

1°12'

1°13'LU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Departemen Bidang Perekonomian,



[Signature]
Rendjo Pudji Budi Astuti